

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Kesultanan Bima merupakan salah satu wilayah yang memiliki peranan penting dalam panggung sejarah Islam khususnya di kawasan Nusa Tenggara. Jauh sebelum terjadinya proses pengislaman, Bima sudah menjadi daerah dengan perkembangan perdangan yang cukup pesat. Menurut catatan Bo Sangaji Kai<sup>1</sup>, cikal bakal daerah Bima dirintis oleh pendatang dari Jawa yang bernama Sang Bima yang kemudian menikah dengan Putri Tasi Sari Naga. Dari pernikahan tersebut melahirkan dua orang putra yang bernama Indra Zamrud dan Indra Komala, kedua anaknya tersebutlah yang menjadi cikal bakal keturunan raja-raja Bima<sup>2</sup>. Dalam catatan lainnya disebutkan bahwa Ncuhi Dara dan Padolo menyampaikan keputusan pada saat Sang Bima memahat Wadu Pa'a mungkin dilakukan oleh Sang Bima yang beragama Hindu Siwaistik atau orang-orang Hindu yang hilir mudik melewati Flores kala itu. Kuat dugaan dia sedang memimpin ekspedisi yang singgah di Pulau Satonda kemudian tiba di teluk Bima. Bisa dikatakan bahwa sang Bima merupakan orang yang memiliki andil penting dalam pendirian kerajaan Bima Hindu namun raja pertama yang memimpin kerajaan Bima yakni putranya Indra Zamrud yang diasuh oleh Ncuhi Dara.

Menurut Morris kedatangan Sang Bima ke tanah *Mbojo*, berhasil mengubah pola kehidupan terutama pada bidang pertanian dan peternakan pada masyarakat Bima bahkan Sang Bima juga dilibatkan dalam pengambilan keputusan adat. Hal tersebut merupakan pertimbangan bagi masyarakat setempat untuk memberikan penghormatan sehingga Sang Bima diangkat sebagai pemimpin dan sebagai penghargaan lain maka nama Sang Bima disepakati sebagai nama Bima yang sebelumnya bernama *Mbojo*<sup>3</sup>. Pada masa sebelum masuknya Islam Bima terbagi menjadi beberapa wilayah. Tiap wilayah dikuasai oleh kelompok masyarakat yang dikepalai oleh seorang "*Ncuhi*"<sup>4</sup>.

Zaman "*Ncuhi*" dipandang oleh orang Bima sebagai permulaan bagi rentetan kehidupan dan oleh karena itu zaman "*Ncuhi*". Disebut juga zaman "*zaman ncuhi ro naka*". Masa *Ncuhi* Merupakan ambang sejarah (Proto Sejarah) pada masa ini masyarakat mulai

---

<sup>1</sup> Bo Sangaji Kai merupakan naskah kuno milik Kerajaan Bima, aslinya ditulis menggunakan aksara Bima. Naskah ini kemudian ditulis ulang pada abad ke-19 dengan menggunakan huruf Arab-Melayu, menggunakan kertas dari Belanda dan Cina.

<sup>2</sup> Abdullah Tajib, *Sejarah Dana Mbojo* (Jakarta: Harapan Massa, 1999), 11.

<sup>3</sup> Abdullah Tajib, *Sejarah Dana Mbojo*, 20.

<sup>4</sup> *Ncuhi* dalam bahasa Indonesia bisa diartikan sebagai tokoh adat atau ketua adat yang memimpin beberapa wilayah tertentu di Bima dengan karakteristik masing-masing contohnya Ncuhi Doro Wani memimpin daerah bagian timur Bima, Ncuhi Dara memimpin wilayah Tengah kemudian Ncuhi Bolo yang memimpin daerah Bima bagian barat.

hidup berkelompok, menetap, mengenal pertanian dan peternakan dan masyarakat hidup teratur dibawah pimpinan seorang *Ncuhi* Menurut tuturan orang Bima yang dimaksud dengan “*Ncuhi*” adalah “*edere domo dou, ina mpuu naba weki marimpa di siri wea nggawo na, di batu wea lele na*. Pengertian “*Ncuhi*”. Berdasarkan tuturan tersebut adalah *Ncuhi* adalah orang yang menjadi sumber kelahiran bagi turunan secara terus-menerus dan merupakan manusia pertama yang menjadi cikal bakal kelompok masyarakat yang bertanggung jawab untuk memberi perlindungan bagi seluruh masyarakat dan dijadikan sebagai sumber hukum yang wajib ditaati<sup>5</sup>.

Dalam naskah Bo ditemukan bahwa masyarakat pada masa itu sudah mengenal jenis tombak, parang, bercocok tanam, di daerah pengunungan dan berternak dan mereka belum mengenal sistem pengolahan tanah persawahan serta bajak-membajak. Kehidupan masyarakat zaman *Ncuhi* mengalami perubahan setelah datangnya imigran Jawa yang tidak ditemui sumber kuat kapan orang Jawa datang ke tanah Bima namun dalam buku Sejarah Nasional Indonesia yang diterbitkan oleh Kemendikbud orang Jawa datang ke tanah Bima sekitar tahun 1575<sup>6</sup>. Perkiraan tersebut belum bisa dijadikan sebagai acuan dikarenakan ekspansi perluasan wilayah Majapahit ke arah Timur dilakukan antara lain menaklukkan Bima pada tahun 1357<sup>7</sup>. Data itu menunjukkan bahwa sebelum tahun 1357 diperkirakan telah datang imigran di Bima. Dalam naskah Bo hanya di jumpai bahwa kedatangan Imigran Jawa saat sebelum pergantian nama “*Mbojo*” menjadi Bima tanpa menyebutkan angka tahunnya. Pada awal XVII Kerajaan Bima mengalami kemelut politik yang berkepanjangan, terjadi intrik politik yakni perebutan kekuasaan dengan serangkaian pembunuhan dan intrik.

Salisi yang merupakan putra raja *Ma Wa'a Dampa* merebut kekuasaan dengan melakukan cara licik bahkan berafiliasi dengan Belanda untuk mencapai kekuasaan di Bima bahkan Salisi membunuh terhadap putra mahkota kerajaan yakni Sangaji Samara yang berusia 9 tahun. Salisi menjadi raja Bima tanpa persetujuan majelis adat. Salisi yang merupakan raja Bima yang terakhir berhasil digulingkan oleh *La Ka'i* yang didukung oleh seluruh rakyat dan bala tentara bantuan dari kerajaan Gowa selama tiga kali ekspedisi. Perjuangan *La Ka'i* adalah perjuangan panjang dan berdarah<sup>8</sup>.

Hubungan Bima dengan Gowa-Tallo di Sulawesi Selatan dalam periode kebebasan zaman bahari orang Makassar sekitar tahun 1567-1575 adalah salah satu tali penyambung

---

<sup>5</sup> Abdul Gani Abdullah, *Bima Dalam Lintasan Sejarah* (Bima: Genta Publishing, 2015), 67.

<sup>6</sup> *Sejarah Nasional Indonesia* Jilid III (Jakarta: Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan RI 1977), 270.

<sup>7</sup> Slamet Mulyana, *Nagarakertagama dan Tafsir Sejarahnya* (Jakarta: Bharatara Karya Aksara, 1977), 120.

<sup>8</sup> M. Hilir Ismail, *Raja dan Sultan Bima* (Pemerintah Kabupaten Bima, 2014), 5.

yang memuluskan jalannya proses ismalmisasi di Bima. Hubungan Bima dengan kerajaan-kerajaan di Makassar dan Bugis dalam periode itu memberi kemungkinan terjalannya hubungan dengan Bima jauh sebelum pertengahan abad ke XVI itu. Akan tetapi pengaruh yang dominan terhadap tahap-tahap pengIslaman Bima adalah hubungan maritime yang terjadi sejak abad ke-XVI hingga permulaan abad ke-XVII<sup>9</sup>.

Menurut Sejarawan Bima M. Hilir Ismail, tahun 1540 M merupakan tonggak awal kedatangan Islam di tanah Bima, proses Islamisasi itu berlangsung dalam tiga tahap yaitu periode kedatangan Islam tahun 1540-1621, periode pertumbuhan Islam tahun 1621-1640 M, dan periode kerajayaan Islam 1640-1950 M. Pada awal sebelum Islam menjadi agama resmi kerajaan, ajaran Islam sudah masuk dan menyebar ke wilayah-wilayah pesisir pantai Bima<sup>10</sup>. Proses pengIslaman di tanah Bima diklasifikasikan oleh Muhammad dapat terbagi dalam empat fase. Pertama, pada abad XIV masyarakat Bima telah mengetahui tentang adanya agama Islam yang dianut oleh masyarakat pulau Jawa. Kedua, pada abad itu juga, datangnya para utusan/mubalig melalui pintu perdagangan dari Jawa, khususnya dari kesultanan Demak dan Gresik, untuk menyebarkan Islam di Bima. Ketiga, adanya beberapa orang masyarakat Bima yang memeluk agama Islam. Keempat, masuknya masyarakat Bima ke dalam Islam secara massal<sup>11</sup>.

Pada tanggal 5 Juli 1640 M menjadi tonggak berdirinya kesultanan Bima dengan Sultan pertama Abdul Khair (La Ka'i) dan perdana menteri *La Mbila* memeluk Islam dan berganti nama menjadi Jalaludin. Bima memasuki era kesultanan yang berlandaskan Islam dalam menjalankan pemerintahannya. Sebenarnya, masyarakat Bima sudah mengenal Islam melalui penyebar agama Islam dari tanah Jawa, Melayu bahkan Gujarat dan Arab pada tahun 1609 M, yang mengenal lebih dulu adalah masyarakat pesisir. Masa kesultanan merupakan masa kejayaan Bima. Bima secara politik dan ekonomi berubah menjadi salah satu daerah perdagangan paling berpengaruh di wilayah Nusa Tenggara pada awal abad ke-16. Islam dimasa kesultanan bersinar cemerlang dan mencapai puncak kejayaan. Selama menjadi Kesultanan.

Bima di pimpin oleh 15 Sultan dalam kurun waktu 322 tahun mulai tahun 1640 M sampai tahun 1951 pasca wafatnya Sultan Muhammad Salahuddin. Menurut Morris (1890), selama berlangsungnya Kesultanan Bima, ada 49 raja dan rultan yang pernah memimpin di Bima. Maharaja Sang Bima diposisikan pada urutan ke-11, sedangkan dalam catatan

---

<sup>9</sup> Abdul Gani Abdullah, *Bima Dalam Lintasan Sejarah* (Bima:Genta Publishing, 2015), 69.

<sup>10</sup> Abdul Gani Abdullah, *Bima Dalam Lintasan Sejarah*, 11.

<sup>11</sup> Muhammad Ahmad, "*Hubungan Goa dan Aceh dalam Proses Islamisasi Kerajaan Bugis Makassar*", dalam Andi Rasdianah (ed.), *Bugis Makassar dalam Peta Islamisasi Indonesia*, IAIN Ujung Pandang, 1982.

Rouffaer yang kemudian diterbitkan oleh Noorduyn (1987), ada 26 raja atau sultan, mulai dari Maharaja Sang Bima sampai dengan Sultan Ibrahim. Sesungguhnya sejak muncul sebagai pusat kekuasaan Islam hingga tahun 1950, Kesultanan Bima diperintah oleh empat belas sultan, mulai dari Sultan Abdul Kahir (1620-1640) sampai Sultan Muhammad Salahuddin (1915-1951) sebagai Sultan Bima yang terakhir. Dalam proses estafet kepemimpinan di Kesultanan Bima, tiap sultan memiliki strategi tersendiri dalam menjalankan roda pemerintahannya. Sultan disamping memiliki kedudukan yakni sebagai kekuasaan tertinggi dalam Kerajaan Bima, ia juga berkedudukan sebagai pemimpin tertinggi majelis *Suba*<sup>12</sup> dalam Kesultanan Bima.

Era kesultanan bertepatan dengan masa penjajahan di Nusantara. Hinga tidak heran berbagai kepetingan penjajah terutama bangsa Belanda juga merambah di Bima<sup>13</sup>. Sultan-sultan yang memimpin sebelum sultan Muhammad Salahuddin lebih menfokuskan pada pada persoalan masyarakat seperti memperbaiki kehidupan rakyat dalam bidang pertanian akibat kemarau, serangan bajak laut, kemiskinan, kelaparan dan juga tidak terlepas dari perang melawan kolonial Belanda. Sedangkan di era sultan Salahuddin Bima lebih diperhatikan dalam berbagai aspek kehidupan yang sangat terlihat adalah aspek agama dan pendidikan<sup>14</sup>.

Sultan Muhammad Salahuddin sebagai sultan terakhir Kesultanan Bima memiliki peranan yang sangat penting dalam proses kemajuan Islam di tanah Bima. Sultan Salahuddin merupakan salah satu pemimpin yang memiliki integritas tinggi dalam menjalankan roda pemerintahan Kesultanan Bima. Ia lahir di Bima pada tanggal 15 Zulhijah 1306 Hijriah atau 14 Juli 1889 dan meninggal dunia pada tanggal 11 Juli 1951 merupakan putra mahkota dari Sultan Ibrahim<sup>15</sup>. Sejak usia muda ia sudah tertarik dengan hal-hal yang berkaitan dengan ilmu keagamaan, pendidikan, dan politik. Sultan Muhammad Salahuddin banyak belajar tentang ilmu pemerintahan dan agama dari ulama dan pejabat istana pada saat itu. Ia juga menekuni ilmu tauhid, serta siasat politik, ia selalu membaca buku-buku, dan rajin mempelajari ilmu Qur'an dan Hadist. Selian mendapat bimbingan dari pala ulama setempat beliau juga berguru pada ulama yang didatangkan dari Batavia yaitu H. Hasan dan Syeh Abdul Wahab dari Mekakah<sup>16</sup>.

---

<sup>12</sup> Majelis ini mencakup Sultan anggota majelis "*Hadat*" "*Syara Tua*". Istilah Suba ini selain bermakna rakyat juga bermakna angkatan militer. Makna-makna tersebut memiliki kaitan juga dengan istilah "*Sera Suba*" yang berarti alun-alun atau lapangan luas. Masyarakat Bima kadang-kadang menyebutnya dengan Seraba.

<sup>13</sup> Tawaluddin Haris, *Kerajaan Tradisional di Indonesia: Bima*, (Jakarta: Gramedia, 2004), 294.

<sup>15</sup> M. Hilir Ismail, *Raja dan Sultan Bima*, (Bima: Pemerintah Kabupaten Bima, 2014), 49.

<sup>16</sup> M. H Hilir Ismail, *Raja dan Sultan Bima*, 50.

Berdasarkan faktor-faktor diatas pada tanggal 2 November 1899 beliau resmi diangkat sebagai “*Jena Teke*”<sup>17</sup> oleh majelis Hadat. Kemudian untuk mendapatkan pengalaman lebih jauh dalam menjalankan roda pemerintahan, maka pada tanggal 23 Maret 1908 diangkat menjadi Jeneli Donggo atau setingkat camat dalam hirarki kepemimpinan Kesultanan Bima. Setelah sang ayah Sultan Ibrahim mangkat pada tahun 1915, Muhammad Salahuddin mengambil alih kekuasaan pemerintahan kemudian tahun 1917 resmi dilantik menjadi sultan Bima ke-XVI yang memerintah dari tahun 1915-1951 M. Disamping menjadi sultan, pada tahun 1949 diangkat menjadi Dewan Raja-raja se-Pulau Sumbawa atas persetujuan Sultan Dompu dan Sultan Sumbawa. Sultan Salahuddin sangat fokus pada pembangunan dalam bidang sosial keagamaan dan pendidikan Islam. Pada proses menjalankan tampuk kekuasaan Sultan Muhammad Salahuddin banyak mendapatkan rintangan dan tantangan.

Pada masa kekuasaanya Bima sedang mengalami krisis politik dan ekonomi yang cukup memprihantinkan akibat ulah dari penjajah. Namun tantangan tersebut dilalui dengan jiwa besar dan keyakinan yang teguh. Beliau melalui tantangan tersebut melalui proses yang panjang. Penulis tertarik meneliti tentang Sultan Salahuddin dikarenakan selain sosok yang sangat dihormati dan dicintai oleh masyarakat Bima. beliau juga merupakan satu-satunya sultan yang memiliki ketertarikan yang tinggi terhadap paham keagamaan, pendidikan, ekonomi dan politik bahkan Sultan Salahuddin dijuluki sebagai “*Ma ka kidi Agama*” atau tokoh yang mendirikan, memajukan dan menjalankan ajaran agama Islam ditanah Bima. Sultan Salahuddin merupakan tokoh utama yang berperan penting dalam perkembangan sejarah Bima pada awal abad ke 20.

Perjuangan beliau dalam menghadapi tantangan dari internal dan eksternal kerajaan patut diabadikan sehingga bisa menginspirasi masyarakat Bima sekarang dan yang akan datang bagi generasi-generasi penerus terutama para remaja dan pelajar. Dari sekian banyak sultan yang memimpin di Kesultanan Bima, Muhammad Salahuddin merupakan sultan yang diabadikan sebagai nama Bandar Udara di Kabupaten Bima yang bernama Bandar Udara ‘Sultan Muhammad Salahuddin Bima’.

## 1.2 Perumusan Masalah

Adapun rumusan masalah berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas maka permasalahan pokok pada penelitian ini berfokus pada “**Kehidupan Masyarakat Bima Pada Masa Kepemimpinan Sultan Muhammad Salahuddin Tahun 1915-1951**” Selanjutnya pokok permasalahan tersebut dituangkan dalam sub-sub masalah sebagai berikut :

---

<sup>17</sup> Jena Teke berarti Putera Mahkota, Sultan Salahuddin merupakan satu-satunya anak dari Sultan Ibrahim yang diangkat sebagai putera mahkota dari 11 bersaudara.



1. Bagaimanakah sejarah Kesultanan Bima?
2. Bagaimanakah situasi sosial-budaya, politik, ekonomi masyarakat Bima sebelum masa kepemimpinan Sultan Muhammad Salahuddin?
3. Bagaimanakah situasi sosial-budaya, politik, ekonomi masyarakat Bima masa kepemimpinan Muhammad Salahuddin tahun 1915-1951?

### 1.3 Tujuan

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini antara lain:

1. Untuk Mengetahui sejarah Kesultanan Bima.
2. Untuk mengetahui situasi sosial-budaya, politik, ekonomi masyarakat Bima sebelum masa kepemimpinan Sultan Muhammad Salahuddin
3. Untuk mengetahui. Situasi sosial-budaya, politik, ekonomi masyarakat Bima masa kepemimpinan Muhammad Salahuddin tahun 1915-1951.

### 1.4 Kegunaan

Adapun kegunaan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Kegunaan Ilmiah: penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memperkaya khazanah ilmu pengetahuan khususnya pengetahuan sejarah dan kebudayaan Islam bagi generasi-generasi terutama generasi penerus Bima selanjutnya dan diharapkan dapat dijadikan bahan acuan untuk penelitian selanjutnya, serta memberikan informasi bagi Pembaca tentang kontribusi Sultan Muhammad Salahuddin dalam kemajuan Islam di Kesultanan Bima Tahun 1915-1951
2. Kegunaan praktis: diharapkan berguna dan bermanfaat bagi pemerhati sejarah dan budaya dan masyarakat pada umumnya sehingga terpatrit dalam hati mereka untuk melestarikan dan menjaga hasil peninggalan Sultan Muhammad Salahuddin serta mengenang sosok seorang pemimpin yang bijaksana, jujur, cerdas, dan religious seperti Sultan Muhammad Salahuddin.

### 1.6 Landasan Teori

Penelitian ini merupakan penelitian sejarah yang berusaha untuk mendeskripsikan peran seorang tokoh dalam peristiwa sejarah. Dalam penelitian ini penulis mampu menjelaskan biografi dan bagaimana peran serta kontribusi seorang tokoh dalam suatu peristiwa. Biografi adalah riwayat hidup tokoh yang ditulis oleh orang lain baik tokoh tersebut masih hidup atau sudah meninggal. Sedangkan riwayat hidup yang ditulis sendiri disebut otobiografi. Otobiografi lebih bersifat pengalaman nyata<sup>18</sup>. Untuk menokohkan

---

<sup>18</sup> Louis M. Smith, "*Metode Biografis*" dalam Norman K. Denzin dan Yvonna S. Lincoln, *Handbook of Qualitative Research*, terj. Dariyatno, dkk. (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2009), 367.

seseorang pelaku, biografi menjadi alat utama. Biografi yang ditulis dengan baik akan mampu membangun inspirasi kepada pembaca. Jadi, dipandang dari sudut ini biografi mempunyai fungsi penting dalam pendidikan. Memahami dan mendalami kepribadian seseorang menuntut pengetahuan latar belakang lingkungan sosio-kultural di mana tokoh itu dibesarkan, bagaimana proses pendidikan formal dan informal yang dialami, watak-watak orang yang ada disekitarnya. Rekonstruksi biografi sangat memerlukan imajinasi yang besar supaya tercipta karya yang baik tanpa menyimpang dari faktor historitas<sup>19</sup>. Selain itu, sejarawan juga dituntut untuk memahami *historical-mindedness*, yaitu bagaimana kita menempatkan diri dalam konteks jamannya, hal yang juga memerlukan empati tersebut. Setiap zaman mempunyai jiwa jamannya sendiri, kita diharapkan mampu menempatkan imajinasi ke jaman itu dan meresapkan suasana atau iklimnya.

Untuk mengkaji lebih dalam tentang kontribusi Sultan Muhammad Salahuddin dalam kemajuan Islam di tanah Bima. Peneliti menggunakan teori peranan sosial sebagai pisau analisis. Peranan merupakan aspek dinamis dari suatu status (kedudukan). Apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan status yang dimilikinya, maka dia telah menjalankan peranannya. Peranan adalah tingkah laku yang diharapkan dari orang yang memiliki kedudukan atau status. Terutama dalam peristiwa sejarah politik konvensional pada umumnya mengutamakan peranan tokoh-tokoh atau orang-orang besar sebagai penentu jalannya sejarah. Untuk menentukan peranan tokoh sejarah dalam proses sejarah dibutuhkan analisis seberapa jauh tokoh membentuk proses sejarah ataukah kondisi kondisi sosial yang menentukan peranan tokoh sejarah. Suatu determinisme sosial sudah barang tentu berpendapat bahwa seluruh peranan seorang tokoh ditentukan bahkan dipengaruhi oleh struktur masyarakat atau paling tidak perannya dijalankan dalam batas-batas struktural masyarakat, jadi dapat disimpulkan terikat pada keterbatasan<sup>20</sup>. Harus diakui bahwa kebebasan dalam artian mutlak tidak dapat diberlakukan karena pelaku selalu terikat pada kebudayaan (*kulturgebundenheit*) dan kepada zaman (*zeitgebundenheit*).

Penelitian ini menggunakan pendekatan politik, pembahasan mengenai politik yang kadangkala disebut sebagai ilmu politik, lahir ketika manusia memikirkan hal peraturan tentang bagaimana mereka dan nenek moyang mereka diperintah<sup>21</sup>. Pendekatan politik ini diharapkan mampu mengupas tentang kebijakan-kebijakan pemerintahan Kesultanan Bima Masa Pemerintahan Sultan Muhammad Salahuddin. Dalam pemikiran politik barat dengan

---

<sup>19</sup>Sartono Kartodirdjo, *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah* (Jakarta: Ombak, 2017), 87.

<sup>20</sup> Sartono Kartodirdjo, 191.

<sup>21</sup> Dorothy Pickles, *Pengantar Ilmu Politik* (Jakarta: Renika Cipta, 1991), 1.

melihat pada filsafat politik seseorang individu dapat meliputi peranan sentral dalam Negara atau merupakan suatu kesatuan tak penting yang hanya diakui keberadaannya jika ia dianggap sebagai anggota kelompok. Sedangkan dalam pandangan Islam tentang pemerintahan bahwa politik Islam merupakan suatu kesatuan yang organik. Tujuan yang hendak diraihny adalah mengkaji implikasinya pada status individu. Dalam teori klasik yang merupakan juga teori organik bahwa peranan individu (yang didefinisikan dalam istilah “fungsi” natural dan buku hak alamiah) tercakup dalam tujuan masyarakat secara keseluruhan<sup>22</sup>.

Menurut Ramlan Surbakti ada 6 pendekatan atau perspektif untuk memahami arti politik diantaranya: (1) Pendekatan kekuasaan yakni cara-cara untuk memperoleh dan mempertahankan kekuasaan. (2) Pendekatan institusional menurut pendekatan ini, politik adalah Negara dengan institusi-institusinya. Jadi yang dipelajari tentang politik adalah mengenai tugas dan wewenang atau apa yang harus dilakukan. (3) Pendekatan moral memandang politik bukanlah suatu yang kotor, tetapi mulia. Dikatakan sebagai suatu yang mulia, karena politik merupakan kegiatan untuk mendiskusikan dan merumuskan “*good society*” atau “*the best regime*”. (4) Pendekatan konflik, dimana politik menurut pendekatan ini merupakan kegiatan untuk memperoleh dan mempertahankan kepentingan. Kepentingan yang dimaksud mencakup kepentingan materil dan non-materil. (5) Pendekatan Fungsional, menurut pendekatan ini politik adalah kegiatan yang berkaitan dengan alokasi nilai-nilai kepentingan yang dirumuskan dalam kebijakan publik. Oleh karena itu, politik dapat dinyatakan menyangkut pembahasan mengenai siapa mendapat apa, kapan dan bagaimana, sebagaimana hal yang dirumuskan dalam kebijakan politik. (6) Pendekatan analisis wacana politik adalah kegiatan mendiskusikan atau mendefinisikan situasi dari suatu fenomena politik.<sup>23</sup>

Menurut Sartono Kartodirdjo (1992) politik adalah sejarah masa kini dan sejarah adalah politik masa lampau. Ia menegaskan sejarah identic dengan politik sejauh keduanya menunjukkan proses yang mencakup kredibilitas para pelaku atau actor dalam interaksinya serta peranannya dalam usaha memperoleh “apa, kapan, dan bagaimana”<sup>24</sup>. Apabila politik diterjemahkan sebagai pola distribusi kekuasaan maka jelaslah bahwa pola distribusi itu dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, dan budaya. Barangsiapa yang menduduki posisi sosial tinggi, memiliki status tinggi maka orang tersebut memiliki kesempatan besar untuk mendapatkan kekuasaan. Dia lebih mudah mengambil peranan sebagai pemimpin

---

<sup>22</sup> Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Pemerintahan Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), 100.

<sup>23</sup> Cholisin dan Nasiwan, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Yogyakarta: Ombak, 2012), 2-5.

<sup>24</sup> Sartono Kartodirdjo, *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah* (Jakarta: Ombak, 2017), 167.



berdasarkan relasinya, ada sumber daya sosial-budaya untuk melakukan peranan politiknya dalam artian untuk memperluas pengaruhnya<sup>25</sup>.

Ada beberapa unsur yang sering ditemukan dalam proses atau gejala politik yaitu kepemimpinan, otoritas, ideologi, organisasi dan lain sebagainya. Masalah kepemimpinan seringkali dijadikan sebagai faktor penentu dalam proses politik. Berdasarkan teori Max Weber kepemimpinan menurut otoritasnya dapat dibedakan menjadi 3 jenis yaitu (1) Otoritas karismatik, yaitu berdasarkan pengaruh dan kewibawaan pribadi; (2) Otoritas tradisional, yaitu yang dimiliki berdasarkan pewarisan atau turun-temurun; (3) Otoritas legal rasional, yaitu yang dimiliki berdasarkan jabatan serta kemampuannya.<sup>26</sup> Dimensi sosial dari proses politik mencakup status dan peranan elite politik seperti bangsawan, aristokrasi, birokrat, kaum intelegensia, elit religious, meritokrasi, teknokrasi, elite desa, dan lain sebagainya.

### **1.7 Kajian Pustaka**

Ada beberapa buku dan karya tulis ilmiah yang sudah membahas tentang Sultan Salahuddin, namun belum ada buku yang secara detail membahas tentang biografi, peran, serta kontribusinya dalam membangun kemajuan di tanah Bima. Beberapa buku dan jurnal yang menjadi tinjauan peneliti ini adalah sebagai berikut:

1. Kerajaan Bima Dalam Sastra Dan Sejarah. Buku karya seorang sejarawan dan filolog Henri Chambert-Loir ini terhimpun tiga teks mengenai sejarah Kerajaan Bima yang ditulis di Bima dalam bahasa Melayu antara abad ke-17 dan ke-19. Buku ini memunculkan beberapa bentuk sastra seperti cerita rakyat, puisi dan prosa. Penulis buku ini berusaha mengemukakan ketiga teks tersebut yang menyoroti sejarah dan masyarakat Bima. Bila dibandingkan dengan buku-buku atau artikel-artikel lain yang telah terbit serta bahan arsip zaman VOC dan zaman penjajahan, maka teks-teks Melayu berasal dari Bima ini mengandung informasi yang tidak terdapat dalam sumber lain. Sebagai contoh, dua puluh tahun yang lalu belum diketahui bahwa kesusasteraan Melayu bukan saja dikenal tetapi juga dihasilkan di Pulau Sumbawa yang jauh dari daerah Sumatera dan Semenanjung Melayu yang dianggap sebagai pusat kebudayaan Melayu. Mengenai penyebaran dan pemakaian bahasa Melayu, ketiga teks ini pun memberikan informasi yang berharga. Mulai dengan masuknya agama Islam bahasa Melayu digunakan di Bima, seperti di Aceh misalnya, sebagai bahasa agama, politik, dan sastra, di samping bahasa lokal yang merupakan bahasa komunikasi sehari-hari.

---

<sup>25</sup> Sartono Kartodirdjo, *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah*, 168.

<sup>26</sup> Cholisin dan Nasiwan, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, 169.

2. BO' Sangaji Kai Catatan Kerajaan Bima. Henri Chambert Loir dan Siti Maryam R.Salahddin merupakan pengarang buku ini yang di tulis di kerajaan Bima dari abad ke 17- abad ke-19, yang merupakan Acuan bagi masyarakat Bima yang isinya memuat merekam semua peristiwa penting dalam Negara, perang dan damai, Silsila Raja raja, Upacara untuk kerajaan, hubungan dengan kerajaan sekitarnya, urusan dagang, perjanjian dengan kompeni Belanda, dan berbagai aspek lain dari masyarakat dan kebudayaan, seperti perkembangan Islam Tahun 2000.
3. Peradilan Agama Dalam Pemerintahan Islam Di Kesultanan Bima (1917-1957) buku ini merupakan hasil karya dari Abdul Gani Abdullah. Buku ini membahas dengan terperinci mengenai sistem politik pemerintahan Kesultanan Bima dan mengenai fungsi lembaga hukum yang diserahkan sepenuhnya pada pemerintahan Kesultanan Bima, sehingga melahirkan badan hokum Syara yakni suatu bentuk sistem peradilan yang niscaya berfungsi untuk menegakan keadilan dan kemaslahatan bagi masyarakat Bima pada umumnya, khususnya bagi penduduk yang menganut agama Islam. Secara lengkap dan terperinci buku ini memaparkan data-data yuridis mengenai bentuk, sistem, dan organisasi pelaksana, status, dan kedudukan hakim serta hasil-hasil keputusan yang dibuatnya.
4. Raja dan Sultan Bima buku hasil karya sejarawan lokal Bima yakni M. Hilir Ismail dan Alan Malingi. Buku ini merupakan naskah lama yang diadopsi bbersama yang bersumber dari naskah "Tokoh-Tokoh Sejarah Lokal Bima Jaman Perintis-Revolusi Kemerdekaan 1611-1950. Buku ini memuat tentang sejarah Bima secara umum dan memuat tentang profil-ptofil sultan yang pernah memimpin Bima dari Sultan Abdul Kahir I sampai Sultan Muhammad Salahuddin sebagai sultan terakhir di Bima.
5. Jurnal yang berjudul Kesultanan Bima Di Pulau Sumbawa, jurnal ini merupakan hasil karya Tawaluddin Haris yang di muat pada jurnal Wacana Universitas Indonesia April tahun 2006. Dalam jurnal ini lebih spesifik membahas mengenai kemunculan Bima sebagai pusat kekuasaan Islam di wialayah Nusa Tenggara serta sistem politik pemerintahan yang dijalankan kesultanan Bima dalam kurun waktu kejayaannya dalam pangung sejarah lokal maupun nasional.
6. Jurnal yang berjudul Sejarah Kehadiran Islam Di Bima, jurnal ini merupakan hasil karya M. Fachri Rahman yang di muat pada Jurnal Ulamma Volume IX Edisi 15 Nomor 1 Januari-Juni 2005. Dalam jurnal ini dibahas mengenai faktor-faktor pendorong masuknya Islam di Bima, asal-usul masuknya Islam di Bima, dan media-media yang digunakan dalam proses penyebarannya.

## 1.8 Metode Penelitian

Menurut Peter L. Senn (1971) dalam bukunya *Social Science and Its Methods*, metode merupakan suatu yang mempunyai langkah-langkah sistematis. Metode penelitian sangat berhubungan dengan desain dari penelitian. Metode penelitian adalah suatu prosedur kerja yang sistematis, teratur dan tertib yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah untuk memecahkan suatu masalah (penelitian) guna mendapatkan kebenaran yang objektif.<sup>27</sup> Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah dengan langkah-langkah sebagai berikut:

### Heuristik Kritik

Heuristik adalah suatu kegiatan dalam tahap pengumpulan sumber-sumber sejarah, untuk mendapatkan data-data dan materi sejarah atau evidensi sejarah.<sup>28</sup> Sebelum menentukan teknik pengumpulan sumber sejarah, pertama-tama yang perlu dipahami adalah bentuk dari sumber sejarah yang akan dikumpulkan. Penentuan sumber sejarah akan mempengaruhi tempat (dimana) atau siapa (sumber lisan) dan cara memperolehnya. Pertama, sumber tulisan yakni jejak masa lalu yang mengandung informasi dalam bentuk tulisan berupa informasi primer maupun sekunder<sup>29</sup>. Informasi primer biasa dikenal dengan pengetahuan dari tangan pertama atau langsung dibuat (waktunya sama) dengan ketika peristiwa itu terjadi. Sumber primer umumnya berupa arsip, catatan perjalanan, risalah siding, daftar hadir rapat, surat keputusan dan sebagainya<sup>30</sup>. Sumber sejarah primer yang tertulis dalam sejarah umumnya berupa dokumen (arsip).

Setelah sumber dikumpulkan, semua sumber yang telah dikumpulkan terlebih dahulu diverifikasi sebelum digunakan. Sebab, tidak semua sumber digunakan dalam penulisan sejarah. Verifikasi dalam penelitian sejarah identik dengan kritik sumber, yaitu kritik ekstren yang berkaitan dengan mencari keotentitas (keaslian) sumber dan kritik intern yang menilai apakah sumber itu memiliki kredibilitas atau tidak<sup>31</sup>. Maka pertama-tama yang harus diperhatikan adalah bahan yang dipakai pada sumber arsip-arsip Kesultanan Bima sudah menggunakan kertas dalam penulisan setiap dokumen. Tahap penyeleksian harus sistematis, yakni diawali dengan kritik ekstren kemudian kritik intren. Jika tahap pertama suatu sumber sejarah tidak memenuhi syarat sebuah sumber sejarah (dari segi otentitasnya), tidak perlu dilanjutkan ketahap verifikasi berikutnya.

---

<sup>27</sup> Andi Prastowo, *Memahami Metode-Metode Penelitian: Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktis* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), 25.

<sup>28</sup> Helius Sjamsuddin, *Metodologi Sejarah*, (Yogyakarta: Ombak, 2007), 86.

<sup>29</sup> Abd Rahman Hamid dkk, *Pengantar Ilmu Sejarah*, (Yogyakarta: Ombak, 2014), 44.

<sup>30</sup> Helius Sjamsuddin, *Metodologi Sejarah*, 45.

<sup>31</sup> Kontuwijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah* (Yogyakarta: Bentang Budaya, 1995), 98-100.

Masalah keaslian suatu dokumen berkaitan dengan 3 hal yaitu adakah sumber itu memang sumber yang dikehendaki, adakah sumber asli atau turunan, adakah sumber itu utuh atau telah diubah-ubah<sup>32</sup>. Dokumen tersebut dapat diperoleh pada lembaga-lembaga khusus dalam hal ini peneliti akan berkunjung ke Arsip Nasional Republik Indonesia, Museum Kesultanan ASI Mbojo dan Museum Samparaja Bima. Ditempat tersebut sudah tersedia informasi yang berkaitan dengan penelitian ini kemudian informasi ini peneliti baca secara langsung dan juga disalin atau digandakan. Sumber Primer dalam penelitian ini berupa Dokumen yang tersimpan di Arsip Nasional Republik Indonesia, Museum ASI Mbojo, dan Museum Samparaja diantaranya :

## 1. Sumber Tertulis

### a. Arsip:

Adapun sumber arsip yang akan dijadikan sebagai sumber pada penelitian ini yakni berupa Arsip surat-surat penting dokumen Sultan Muhammad Salahuddin selama masa pemerintahannya tahun 1915-1951 diantaranya:

- Arsip Kerajaan Bima No. Inv. 28; “Majelis *Sjoera*” Kerdajaan Bima 1941 dan Surat keputusan hukum syara Kerajaan Bima tentang pembagian waris tahun 1949. Surat-surat ini merupakan arsip yang diterbitkan tahun 1941 dan 1949 merupakan surat asli dari Kesultanan Bima yang tersimpan di ANRI RI. Surat ini menjelaskan tentang kedudukan Majelis Sjoera sebagai majelis yang memutuskan kebijakan Sultan dari hasil musyawarah bersama. Struktur kelembagaan majelis syari’ah terdiri dari ketua majelis (*rais al-majelis*), penasehat (*nascih*), yang dibantu oleh anggota (*a’dha*); *lebenae*, khatib tua, imam dan lebe. Majelis Hadat dan Syara’ ini beraku secara turun temurun sampai dengan Sultan Bima ke-12 Sultan Ibrahim (1050 H-1336 H/1631-1917 M).
- Arsip Kerajaan Bima No. Inv. 28; “Peraturan Kewajiban Galllarang-gallarang Kepala Dalam Daerah Kerajaan Bima”. Arsip ini tersimpan di ANRI dalam bentuk surat asli dan bukan salinan. Arsip ini menjelaskan tentang ikrar atau sumpah kesetian rakyat kepada sultan. Dalam hal ini sultan dianggap sebagai pemimpin pemimpin tertinggi dalam tatanan kekuasaan masyarakat Bima.

---

<sup>32</sup> Nugroho Notosusanto, *Masalah Penelitian Sejarah Kontemporer* (Jakarta: Yayasan Idayu, 1978), 38.

- Arsip Yayasan Museum Samaparaja Bima (YMSB); “Beslit No. 76 tanggal (Raba-Bima), 19 Nigatsu 2605 (19 Pebruari 1945), Pemerintah Keradjaan Bima”, box 5, Arsip Yayasan Museum Samaparaja Bima. “Soesoenan doedoek segala pangkat Adat dalam Astana di Keradjaan Bima”, box 5.
- Surat Maklumat 22 November 1945 tentang kesiapan Kesultanan Bima bergabung dengan NKRI.

b. Buku:

- Buku hasil karya Sultan Muhammad Salhuddin berjudul “Nurul Mubin” yang diterbitkan tahun 1942.
- Daftar silsilah raja-raja Kesultanan Bima dari Sultan Abdul Kahir I sampai Sultan Salahuddin.

2. Sumber Benda

Sumber-sumber benda banyak masih tersimpan rapi dan terawatt di Museum ASI Mbojo dan Museum Samaparaja. Kedua tempat ini dijadikan sebagai cagar budaya dan dikelola dengan baik oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bima. Berikut adalah sumber-sumber berupa benda diantaranya:

a. Benda Monumental

- Bagunan Istana Kesultanan Bima atau sekarang lebih dikenal dengan sebutan ASI Mbojo merupakan bagunan istanan yang didirikan pada tahun 1927 yang dirancang oleh seorang arsitek keturunan Ambon Obzicther Raheta berkolaborasi bersama Sultan Muhammad Salahuddin. Bagunan ini memiliki nuansa artsitektur percampuran Bima dan Eropa. Bagunan ini secara resmi dialih fungsikan sebagai Museum pada tahun 1889 oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat H. Warsito. Kondisi bangunan ini bukanlah bangunan lama dan telah banyak dilakukan renovasi namun tetap mempertahankan kekhasan bentuk istana.
- Bagunan Masjid Sultan Muhammad Salahuddin yang dibangun pada tahun 1770. Pada saat itu masjid ini merupakan salah satu tempat penyebaran Islam dan pendidikan Islam di Kesultanan Bima dan sekitarnya. Masjid tersebut juga merupakan saksi bisu dari perkembangan Islam di wilayah Bima.

b. Benda Ornament

- Benda-benda pusaka peninggalan kerajaan Bima yang terbuat dari emas, seperti: Mahkota, Keris, Golok Sakti La Ngguntu Rante, Keris Pusaka,



Payung Kerajaan, Ranjang Raja, Tongkat, Pakaian Adat, Baju Perang, Perkakas Rumah, dan lain sebagainya yang digunakan sehari-hari oleh Raja.

- Lambang dan Stempel Kesultanan Bima. Lambang ini diciptakan oleh Sultan Abdul Hamid pada tahun 1786. Lambang ini terdiri dari tiga bagian. Bagian 1: sebelah kiri yang terdiri dari (1) kepala garuda yang menoleh ke kiri, melambangkan pemerintah atau lembaga “*hadat*”, (2) 7 helai bulu sayap luar bermakna 7 orang Tureli dalam kabinet kesultanan Bima, (3) 5 helai bulu sayap kanan mengungkap asal-usul “*dana Mbojo*”.

- c. Foto-foto pribadi Sultan Muhammad Salahuddin seperti foto dengan pejabat kerajaan, foto dengan pejabat kolonial, foto permaisuri Sultan dan berserta keluarganya adapun foto-foto yang tersimpan di Mesuem ASI Mbojo berupa foto: Foto tahun 1927 merupakan foto sultan dan pegawai istana bersama pejabat colonial kepala Duct Of Timur, foto tahun 1910 merupakan foto Sultan Salahuddin dengan sang ayah Sultan Ibrahim.

### Interpretasi

Tahap ketiga dalam metode sejarah adalah interpretasi. Tahapan Interpretasi adalah tahapan penelitian yang mana fakta yang ada ditafsirkan sehingga ditemukan struktur logisnya. Dalam penafsiran fakta-fakta dilihat hubungan, keterkaitan, disesuaikan dengan tema sehingga kegunaan sebagai bahan dasar penulisan dapat terpenuhi. Analisis bersifat menguraikan dan sintesis bersifat menyatukan. Keduanya merupakan metode dalam interpretasi<sup>33</sup>. Pada tahap ini dituntut kecermatan dan sikap objektif seorang sejarawan, terutama dalam hal itu dapat dilakukan dengan mengetahui watak-watak peradaban atau dengan kata lain kondisi umum yang sebenarnya dan menggunakan nalar yang kritis<sup>34</sup> agar ditemukan kesimpulan atau gambaran sejarah yang ilmiah.

Sultan Muhammad Salahuddin merupakan salah satu pemimpin yang berhasil mengembangkan Islam di tanah Bima. Hal ini terbukti jika dilihat dari beberapa sumber yang dimana menjelaskan beliau suka belajar ilmu agama terutama Fiqhi dan Qira'ah dan berguru pada ulama-ulama hebat. Sultan juga suka membaca dan menulis hal ini juga terbukti dengan karya-karya beliau. Jika dikaitkan dengan teori kepemimpinan sosok Sultan Muhammad Salahuddin merupakan pemimpin yang bijaksana dan adil. Dalam berbagai sumber dijelaskan tentang pembentukan badan “*Syara*” membuktikan bahwa sultan sangat demokratis dalam pengambilan keputusan.

---

<sup>33</sup> Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, (Yogyakarta: Benteng Budaya, 1995), 100.

<sup>34</sup> Abd Rahman Hamid, 50.

Pada masa kepemimpinannya Sultan Muhammad Salahuddin banyak mendapatkan tekanan terutama dari pihak kolonial Belanda dan Jepang. Walaupun Bima pada saat itu berada dalam pengaruh kolonial tidak mematahkan semangat beliau dalam memajukan Islam di tanah Bima. Pada era kekuasaannya Islam berkembang pesat terutama dalam bidang pendidikan. Muhammad Salahuddin dalam beberapa sumber mengatakan yterlahir sebagai tokoh yang taat menjalankan perintah Agama (Islam), karena itu beliau dikatakan sebagai tokoh Nasianalis Islam. Tidaklah heran jika Sultan Muhammad Salahuddin dijuluki sebagai “*Makakidi Agama*” atau pendiri pondasi agama dikarenakan dia berhasil membangun pondasi Islam yang kuat bagi masyarakat Bima dari aspek sosial-budaya, agama, politik, dan pendidikan. Beliau merupakan Sultan Bima yang terakhir yang juga sangat mencintai NKRI dengan membela perjuangan rakyat Indonsesia dalam mencapai proses kemerdekaan bahkan Sultan Muhammad Salahuddin pun secara resmi bergabung dengan NKRI dan mendukung penuh proses kemerdekaan bangsa pada waktu itu. Kehebatan sosok inilah yang menjadikan Muhammad Salahuddin sebagai satu-satunya sultan yang diabadaikan sebagai nama Bandar Udara di Kabupaten Bima.

### **Historiografi**

Historiografi adalah pelukisan sejarah, gambaran sejarah tentang peristiwa masa lalu yang disebut sejarah. Penyajian ini hendaknya mampu memberikan gambaran mengenai proses penelitian dari awal sampai penarikan kesimpulan. Tahap ini merupakan tahap akhir untuk menyajikan semua fakta kedalam bentuk Sistematika Penulisan. Layaknya laporan penelitian ilmiah, penulisan hasil penelitian sejarah hendaknya dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai proses penelitian dari awal (fase perencanaan) sampai dengan akhir (penarikan kesimpulan). Tahapan penulisan ini, tegasnya menyampaikan informasi kepada khalayak dalam memberikan jawaban terhadap perumusan masalah yang diajukan.



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG